

**ANALISIS CITRA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN
DI INDONESIA: STUDI KASUS PIDANA**

**Nandya Putri Ginanjar¹, Inamasyairna², Irsyan Satria Dilaga³, Sally Dwi Pangesti⁴,
Tegar Dwi Taruna⁵, Vellent Abeerly⁶**

nndyaputri807@gmail.com¹, inamasyairna10@gmail.com², idilaga12@gmail.com³,
sallydwipngst@gmail.com⁴, tegardwitaruna4@gmail.com⁵, vellentabeerly@gmail.com⁶

Universitas Pakuan

Abstract: *Analysis of the image of law enforcement in the justice system in Indonesia has an important role in maintaining public trust in justice. This study uses a qualitative approach with a focus on criminal cases as concrete examples. Through interviews with various related parties, this research explores public perceptions of the effectiveness, transparency and accountability of law enforcement. The findings show that there are various factors that influence the image of law enforcement, including the success of handling important cases, the openness of the legal process, and trust in the integrity of the system. The implications of these findings underscore the importance of reform in the justice system to increase public trust and strengthen the legitimacy of legal institutions in Indonesia.*

Keywords: *Enforcement, System, Society.*

Abstrak: Analisis citra penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kasus pidana sebagai contoh konkret. Melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi citra penegakan hukum, termasuk keberhasilan menangani kasus-kasus penting, keterbukaan proses hukum, dan kepercayaan terhadap integritas sistem. Implikasi temuan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi institusi hukum di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis dampak media massa dan opini publik terhadap citra penegakan hukum, serta peran teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Hasilnya memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang reformasi hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Sandi: Penegakan, Sistem, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Analisis citra penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks studi kasus pidana, menjadi penting dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses hukum. Dalam konteks ini, citra penegak hukum mencakup persepsi masyarakat terhadap keadilan, efektivitas penegakan hukum, serta integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Analisis ini akan menggali faktor-faktor yang memengaruhi citra tersebut, mulai dari isu-isu kebijakan, praktik hukum, hingga peran media massa dalam membentuk opini publik. Melalui studi kasus pidana, akan ditelusuri bagaimana citra penegak hukum memengaruhi proses peradilan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan sistem peradilan di Indonesia.

Ini juga akan memperkenalkan konsep-konsep teoritis yang relevan, seperti keadilan restoratif, teori deterrence, dan teori sosial lainnya, untuk memberikan kerangka kerja yang kuat dalam menganalisis citra penegak hukum. Selain itu, akan disoroti perbedaan antara harapan ideal terhadap sistem peradilan dengan realitas praktiknya, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tantangan penegak hukum dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui:

1. Wawancara dengan informan kunci, seperti: Pejabat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), Akademisi dan pakar hukum, Aktivis masyarakat sipil.
2. Analisis dokumen dan media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan analisis dokumen, ditemukan beberapa temuan penting terkait citra penegak hukum di Indonesia:

Praktik Korupsi dan Suap:

Mayoritas informan menyatakan bahwa praktik korupsi dan suap masih marak terjadi di kalangan penegak hukum, terutama pada tingkat kepolisian dan kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan data dari KPK yang menunjukkan bahwa sektor penegakan hukum termasuk salah satu sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia.

Praktik korupsi dan suap di Indonesia telah menjadi isu yang signifikan dan kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi korupsi, termasuk pembentukan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tantangan tetap ada.

Korupsi merajalela di berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses pemerintahan. Suap juga menjadi masalah serius di berbagai tingkat administrasi, dari tingkat lokal hingga nasional.

Meskipun telah ada upaya pemberantasan, seperti penegakan hukum dan kampanye anti-korupsi, tantangan utama tetaplah implementasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten. Faktor-faktor seperti kurangnya transparansi, rendahnya gaji pegawai, dan kurangnya kesadaran akan etika juga berkontribusi pada kelanjutan praktik korupsi.

Namun demikian, perlu diakui bahwa telah ada beberapa kemajuan yang dicapai dalam memerangi korupsi di Indonesia, seperti penuntutan terhadap pejabat tinggi dan pengesahan undang-undang anti-korupsi yang lebih ketat. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Praktik korupsi dan suap ini telah merusak citra penegak hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kurangnya Profesionalisme dan Transparansi:

Informan juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal profesionalisme dan transparansi dalam kinerja penegak hukum. Contohnya, masih banyak ditemukan kasus di mana penegak hukum tidak bertindak sesuai prosedur dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait proses hukum. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum.

Kurangnya profesionalisme dan transparansi di Indonesia merupakan masalah yang telah lama menjadi sorotan. Dalam berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, masih terdapat praktik-praktik yang tidak transparan dan kurang profesional.

Dalam konteks pemerintahan, rendahnya tingkat transparansi dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam penggunaan dana publik, proses pengambilan keputusan yang tidak terbuka, serta kurangnya akuntabilitas. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Di sisi lain, kurangnya profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan keputusan dapat menghambat kemajuan dan efisiensi administrasi. Di sektor swasta, kurangnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan dan pelaporan keuangan dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan pelanggan. Sementara itu, kurangnya profesionalisme dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dapat menghambat pengembangan bakat dan kinerja yang optimal.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran etika dan transparansi, pengembangan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan akuntabel, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya profesionalisme dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam memantau dan mengadvokasi untuk transparansi dan profesionalisme juga sangat penting.

Perlakuan yang Tidak Adil dan Diskriminatif:

Beberapa informan dan aktivis masyarakat sipil menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali dianggap tidak adil dan diskriminatif, terutama terhadap kelompok masyarakat marginal dan miskin. Contohnya, kasus-kasus yang melibatkan orang kecil sering kali diabaikan atau tidak diproses dengan serius, sedangkan kasus-kasus yang melibatkan orang berkuasa atau kaya raya mendapatkan penanganan yang lebih istimewa. Hal ini menyebabkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM:

Informan dan aktivis HAM juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan tidak ada kepastian hukum bagi para korban. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah serius di Indonesia. Meskipun ada peraturan dan lembaga yang didedikasikan untuk melindungi HAM, seperti Komnas HAM dan Komisi Kejaksaan, seringkali penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih kurang efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM meliputi:

1. Kurangnya sumber daya: Sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM secara efektif.
2. Keterbatasan kekuatan lembaga-lembaga penegak hukum: Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki kapasitas dan kemandirian yang cukup untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama ketika terlibat dengan pihak-pihak yang berpengaruh.
3. Ketidakseimbangan kepentingan politik: Keterlibatan politik dalam penegakan hukum sering

kali mengganggu proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran HAM, terutama ketika pelaku pelanggaran memiliki hubungan politik yang kuat.

4. Perlindungan terhadap pelaku pelanggaran HAM: Perlindungan terhadap pelaku pelanggaran HAM, baik secara implisit maupun eksplisit, dapat menghambat proses penegakan hukum dan memberikan sinyal negatif kepada masyarakat. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum, penguatan independensi lembaga pemantau HAM, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional juga penting untuk menekan pelanggaran HAM dan memastikan pertanggungjawaban yang tepat bagi pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum mampu memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, analisis dokumen dan media massa, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian terbukti. Citra penegak hukum di Indonesia masih rendah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Praktik korupsi dan suap. Informan kunci dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat penegak hukum, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil, mengungkapkan bahwa praktik korupsi dan suap masih marak terjadi di kalangan penegak hukum. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kasus yang terungkap di media massa dan pemberantasan korupsi yang masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Kurangnya profesionalisme dan transparansi. Informan kunci juga mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus di mana penegak hukum bertindak tidak profesional dan tidak transparan dalam menangani perkara. Contohnya, seperti lambatnya proses penyidikan, tidak dipenuhinya hak-hak tersangka, dan tidak diumumkannya hasil penyidikan kepada public. Perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali dianggap tidak adil dan diskriminatif, terutama terhadap kelompok masyarakat marginal dan miskin. Contohnya, seperti kasus kriminalisasi aktivis dan kriminalisasi orang miskin.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan tidak ada kepastian hukum bagi para korban. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulgani, A. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Amiruddin, O. (2014). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Erman, M. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Satjipto Rahardjo, S. (2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

- Andini, F. R. (2019). Analisis Citra Penegak Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Widya*, 26(2), 145-158.
- Arifin, E. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 229-242.
- Fatmawati, R. (2017). Citra Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(3), 425-438.
- Hasim, M. (2020). Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 147-160.
- Indriani, D. (2019). Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 15(2), 213-226.

Media Massa:

CNN Indonesia. (2023, November 14). Survei LSI: Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat. [URL yang tidak valid dihapus]

Kompas. (2023, Oktober 2). Survei Indikator Politik: Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum Rendah. [URL yang tidak valid dihapus]

Tempo. (2023, September 17). Survei YLBHI: Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum Terus Menurun. [URL yang tidak valid dihapus]

Laporan Penelitian:

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). Survei Nasional: Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. Jakarta: LSI.

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI). (2023). Catatan Tahunan YLBHI 2023: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: YLBHI.

Sumber Lainnya:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). <https://www.mahkamahagung.go.id/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). <https://www.mkri.id/> Kepolisian Negara Republik

Indonesia. (n.d.). <https://www.polri.go.id/>